

HARIAN

LENTERA

Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN UNTUK UMUM
TERBIT SENIN - JUMAT
12 Halaman

E-mail redaksi@lenteratoday.com
Redaksi 031-87854491
Iklan 031-87854491
Kantor Redaksi
Jl. Rungkut Asri Utara VI no 26
Surabaya

EDISI JUMAT / 21 Agustus 2020

Sering membandingkan
mengurangi rasa
kebahagiaan, lupa
kelebihan yang nampak

Tantri Kotak, Perwanji

RI 'BAKAR' MILIARAN RUPIAH UNTUK INFLUENCER

BEBERAPA INFLUENCER YANG DIGUNAKAN JASANYA



Writte Agatha



Ali Syakiesh



Ayushita W M



Ahmad Jalaluddin Rumi

RP114,4 JUTA

RP114,4 JUTA



SCAN ME

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, pemerintah telah menghabiskan anggaran sebesar Rp 1,29 triliun untuk keperluan aktivitas digital sejak tahun 2014 hingga 2020. Dari duit tersebut, sekitar Rp 90,45 miliar digelontorkan untuk influencer alias key opinion leader (KOL). Salah satu yang mendapat kritikan tajam adalah penggunaan artis sebagai influencer dalam mengomunikasikan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai membungkam kritikan rakyat. Menurut kalangan pengamat strategi 'bakar' uang ini berbahaya karena bisa menciptakan kesadaran palsu. Jangan sampai deh, terbentuk generasi 'halu'.

Baca Hal 11

ANGGARAN RI UNTUK AKTIVITAS DIGITAL

Menurut Tahun

Tahun	Jumlah	Paket
2014	Rp606 juta	(42 paket)
2015	Rp609 juta	(2 paket)
2016	Rp5,3 miliar	(3 paket)
2017	Rp535,9 miliar	(24 paket)
2018	247,6 miliar	(25 paket)
2019	Rp183,6 miliar	(36 paket)
2020	Rp322,3 miliar	(25 paket)

Menurut Lembaga / Kementerian

- Kementerian Pariwisata : Rp263,29 miliar (44 paket)
- Kementerian Keuangan : Rp21,25 miliar (17 paket)
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan : Rp1,95 miliar (14 paket)
- Kepolisian RI : Rp937 miliar (12 paket)
- Kementerian Perhubungan : Rp11 miliar (11 paket)
- Kemenkominfo : Rp12,27 miliar (9 paket)
- Kemenko Perekonomian : Rp2,7 miliar (8 paket)
- Badan Koordinasi Penanaman Modal : Rp2,15 miliar (4 paket)
- Kementerian PUPR : Rp3,47 miliar (3 paket)
- Kementerian Dalam Negeri : Rp1,35 miliar (2 paket)

UPDATE PERKEMBANGAN VIRUS CORONA

	KASUS POSITIF	SEMBUH	MENINGGAL DUNIA
INDONESIA	147,211	100,674	6,418
Seluruh Dunia	22,413,126	14,338,859	787,686

Update : 20 Agustus 2020 Pukul 15.27 PM
Sumber : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Johns Hopkins

'OBAT CORONA' UNAIR, BPOM: TAK TERLALU MANJUR

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengatakan telah terjun mengawasi uji klinis obat kombinasi baru untuk Covid-19 lewat inspeksi pada 28 Juli lalu. Universitas Airlangga (Unair) bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara (BIN), dan TNI AD mengklaim mengembangkan obat baru. Terdapat tiga kombinasi yaitu Lopinavir/Ritonavir dan Azithromycin, kemudian Lopinavir/Ritonavir dan Doxycycline, lalu Hydrochloroquine dan Azithromycin. Hasilnya, BPOM mendapati sejumlah temuan kritis terhadap uji klinis tahap 3. Artinya, obat ini belum bisa diproduksikan secara massal dalam waktu dekat. BPOM merekomendasikan dilakukan perbaikan berbagai koreksi-koreksi critical. Sebab, obat ini dinilai tak terlalu manjur.



KATA MEREKA TENTANG OBAT CORONA UNAIR



Kepala BPOM Penny Lukito

"Dalam inspeksi yang kami lakukan per tanggal 28 Juli 2020 kami temukan beberapa gap. Ada beberapa temuan yang sifatnya critical, major, minor. Temuan critical, terutama dampaknya adalah terhadap validitas dari proses uji klinik itu dan juga validitas dari hasil yang nanti didapatkan. Itu menjadi perhatian BPOM. Pak KSAD sudah kami laporkan tadi malam dan beliau sangat mendukung untuk memperbaiki berbagai koreksi-koreksi critical yang kami sampaikan dan temuan lainnya, sehingga uji klinis ini bisa kita lanjutkan. Agar nanti hasilnya valid."



Sekretaris YLKI Agus Sujatno

"Yang dilakukan BPOM pada Unair untuk mengevaluasi kembali hasil kajian obat Covid-19 adalah sesuatu yang wajar dilakukan BPOM. BPOM memberi kepastian keamanan obat sebelum diproduksi massal dan diberi izin edar. Prinsip kehati-hatian memang dibutuhkan untuk mencegah munculnya masalah baru di kesehatan masyarakat."



Ahli Biologi Molekuler Indonesia Ahmad Utomo

"Relatif aman diberikan dengan mengevaluasi hasil pemeriksaan klinis, fungsi liver, fungsi ginjal, dan ECG. Karena data ini kesannya kok too good to be true." "Padahal kalau kita belajar dari Inggris saat meneliti obat dexamethasone, disebutkan (obat) itu hanya memberikan benefit pada pasien gejala berat dan tidak memberikan benefit pada pasien (Covid-19) dengan gejala ringan."



Rektor Unair Prof Moh Nasih

"Sebagaimana masukan dari BPOM. Untuk selanjutnya, tim peneliti juga menunggu dan akan mempelajari semua masukan tertulis dari BPOM."



Guru Besar Sekolah Farmasi ITB, Daryono Hadi Tjahjono

"Mulai dari uji in vitro kemudian protokol uji klinisnya berantakan. Sebaiknya riset diulang. Kalau terjadi kesalahan sangat berbahaya, Badan POM yang punya otoritas untuk diperbaiki atau diulang risetnya."



Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetyani

"Silakan lakukan riset dengan prosedur standar, bersungguh-sungguh, dan penuh kehati-hatian dalam memutuskan kesimpulannya agar tidak menjadi polemik di masyarakat. Selain itu, ini adalah pekerjaan besar yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas."

JELANG PILWALI SURABAYA, DPRD MINTA ASN JAGA NETRALITAS

Surabaya – Mulai memanasnya Pemilihan Walikota (Pilwali) Surabaya diharapkan tidak mengganggu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Pahlawan. Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni mengingatkan agar ASN tidak terlibat dalam kegiatan politik di Pilwali yang akan digelar 9 Desember nanti. Seperti diketahui, ada nama salah satu ASN Pemkot yang mencuat dan tampak gencar melakukan sosialisasi, terutama di baliho dan spanduk.

"Tahapan Pilwali Surabaya sudah berjalan, tanggal 4 sampai 6 September 2020 merupakan jadwal pendaftaran pasangan calon yang diusung partai politik. Saya berharap ASN Pemkot tidak ikut tarik menarik kepentingan dan terlibat dalam dinamika pilwali," katanya, Kamis (20/8).

Fathoni kembali menegaskan agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya harus jeli. "Bawaslu jangan hanya berdiam diri di kantor, melainkan harus turun ke lapangan. Kalau mendapati adanya program pemerintah kota yang dikampanyekan oleh OPD tapi tidak sesuai tupoksinya



Anggota Komisi A DPRD, Surabaya Arif Fathoni

patut di waspadai. Karena bisa jadi penyalahgunaan wewenang," terangnya.

Selain itu Fathoni mengingatkan agar pihak Inspektorat Pemkot Surabaya benar-benar menegakkan disiplin ASN.

Ketua DPD II Partai Golkar Kota Surabaya itu menekankan, kalau sudah ada ASN yang masuk menjadi tim sukses bacawali atau bertemu dengan bacawali untuk jabatan tertentu, sebaiknya dihentikan mulai sekarang. "Karena pasti tidak akan independent. ASN harus netral, sesuai sumpah janjinya yang mendharma baktikan untuk kepentingan negara," pungkasnya. (Ard)



- ASN dilarang mendeklarasikan diri sebagai calon kepala daerah
- Dilarang memasang spanduk promosi kepala calon
- Dilarang menjadi pembicara pada pertemuan Parpol
- Dilarang foto bersama calon
- Dilarang mengunggah memberikan Like, atau mengomentari dan sejenisnya serta menyebarluaskan gambar maupun pesan visi misi calon baik di media online maupun media sosial
- Dilarang mendekati Parpol terkait dengan pengusulan dirinya atau orang lain menjadi calon
- Dilarang menghadiri deklarasi calon, baik itu dengan atau tanpa atribut Parpol

DASAR-DASAR

- UU No. 5 tahun 2014
- UU No. 9 tahun 2015
- UU No. 10 tahun 2016
- Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2004
- Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010
- PJP No. 16 tahun 2019
- PERBAWASLU 6 2018
- SE KASN No. B-2900/KASN/11/2017
- Surat MENPAN RB No. B/71/M, SM, 00.00/2017

DPRD KAB. BLITAR KEBUT PEMBAHASAN P-APBD TA 2020

GELAR PARIPURNA SEHARI 2 KALI, RIJANTO JANJI BUAT LANGKAH KONKRIT

Blitar - Agar pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 cepat selesai, DPRD Kabupaten Blitar menggelar rapat paripurna secara virtual sehari 2 kali. Dalam pandangan umum (PU) fraksi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) diminta memiliki rencana dan langkah konkrit agar target yang dihendaki tercapai.

"Adanya perubahan-perubahan regulasi pengurangan SILPA penyesuaian pendapatan belanja dan pembiayaan daerah yang selanjutnya dituangkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2020, akan diperhatikan," tutur Bupati Blitar Rijanto di Rapat pertama Penyampaian Pandangan Umum (PU) fraksi, Rabu (19/8).

Selain bupati hadir juga Wakil Bupati Blitar Marhaenis Urip Widodo, Sekertaris Daerah Totok Subihandono bersama jajarannya, serta Forkompinda Kabupaten Blitar yang mengikuti melalui video confren di tempatnya masing-masing.

Untuk diketahui, pada anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar mengalami peningkatan sebesar Rp 12 miliar lebih. Rijanto mengatakan ini karena adanya tambahan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar (SD) dan BOS Sekolah Menengah Pertama (SMP). "Hal itu, berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor

231/P/2020 Tentang Satuan Pendidikan Penerima BOS Gelombang 1 Tahun 2020 serta Silva Bos Tahun 2019. Ini juga sekaligus menjawab pandangan umum fraksi kebangkitan bangsa (FKB)," terang Rijanto.

Kemudian terhadap saran dan usul mengenai pelaksanaan belanja modal untuk barang dan jasa, supaya dilaksanakan dengan program Padat Karya Tunai (PKT) yang sederhana, tidak ribet atau tidak berbelit-belit. "Melalui penunjukan langsung akan kami perhatikan, serta dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga menjawab pandangan umum Fraksi Gerakan Pembangunan Nasional (FGPN)," ungkap Rijanto.

Selanjutnya menanggapi PU Fraksi PKB terhadap adanya penurunan anggaran pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, Bupati Rijanto mengaku disebabkan adanya penurunan jumlah pasien kurang lebih 60% sebagai dampak dari wabah Covid-19.

Lalu pada anggaran Dinas Sosial Kabupaten Blitar yang mengalami penurunan lebih dari Rp 3 miliar dikatakan akibat refocusing APBD Tahun Anggaran 2020. Sesuai amanat SKB Mendagri dan Menkeu No 119/28 1 3/4 C dan No 117/kmk. No.07/2012 tentang Percepatan Penyusunan APBD Tahun 2020 dalam



rangka penanganan Covid-19, serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional yang mewajibkan melakukan rasionalisasi belanja barang jasa dan belanja modal sebesar 50%.

Sementara mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), bupati yang akan maju lagi periode kedua ini menjelaskan jika PAD menunjukkan tren peningkatan yang positif selama kurun waktu 5 tahun kebelakang. Meningkat rata-rata 10,74% namun dengan adanya pandemi Covid-19 dan beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdampak terhadap penerimaan pajak pada tahun anggaran 2020. "Maka akan dibahas secara rinci dan teknis pada pembahasan lebih lanjut, melalui rapat kerja Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemkab Blitar," tutup Rijanto. (ais)

DIDUGA CORONA, PGRI: PULUHAN GURU SURABAYA MENINGGAL DUNIA

Surabaya- Diduga terinfeksi virus Covid-19, sekitar 35 guru dan tenaga kependidikan di Surabaya dilaporkan telah meninggal dunia. Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi membenarkan kabar tersebut. Meski demikian, Unifah mengaku belum memiliki data pasti berapa jumlah persisnya.

"Guru berguguran itu betul. Jumlah tepatnya saya tidak tahu. Ada yang klaim 35 boleh jadi. Dari laporan meninggalnya di rumah sakit. Ada yang 1-2 minggu sudah sakit," ujarnya dikutip Kamis (20/8). Untuk diketahui, menurut data pokok yang dikutip dari <https://dapo.kemdikbud.go.id>

Terkait penyebabnya, Unifah menilai Dinas Pendidikan Surabaya kurang cermat dalam mengambil kebijakan di tengah pandemi. Ia mencontohkan saat murid libur jelang tahun ajaran baru, guru-guru tetap diharuskan masuk.

"Sebenarnya dengan adanya guru-guru yang masuk di sekolah, mereka berinteraksi satu sama lain kan," ucap Unifah. Merespon kejadian di Surabaya, PGRI

pun meminta pemberlakuan Work From Home (WFH) kepada pemerintah daerah.

Unifah pun mengapresiasi Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang menerima usulan PGRI. Menurut Unifah langkah serupa sebaiknya diikuti oleh pemda lainnya. Ia bilang saat ini zonasi risiko COVID-19 melalui warna merah, kuning, hijau sama sekali tidak menjamin. Meski zona kuning, ia bilang PGRI meragukan keamanannya.

Selain Surabaya, Unifah juga mendapat laporan gugurnya guru di Palembang lantaran tertular saat menerima orang tua siswa yang datang ke sekolah. Hingga saat ini setidaknya ada dua daerah lain yang sudah melaporkan meninggalnya guru akibat Covid-19 seperti 1 orang guru yang meninggal akibat Covid-19 di Kecamatan Mejubo di Kudus, Jawa Tengah. Selebihnya sejumlah guru seperti di wilayah Batam sampai Bukittinggi dilaporkan positif Covid-19.

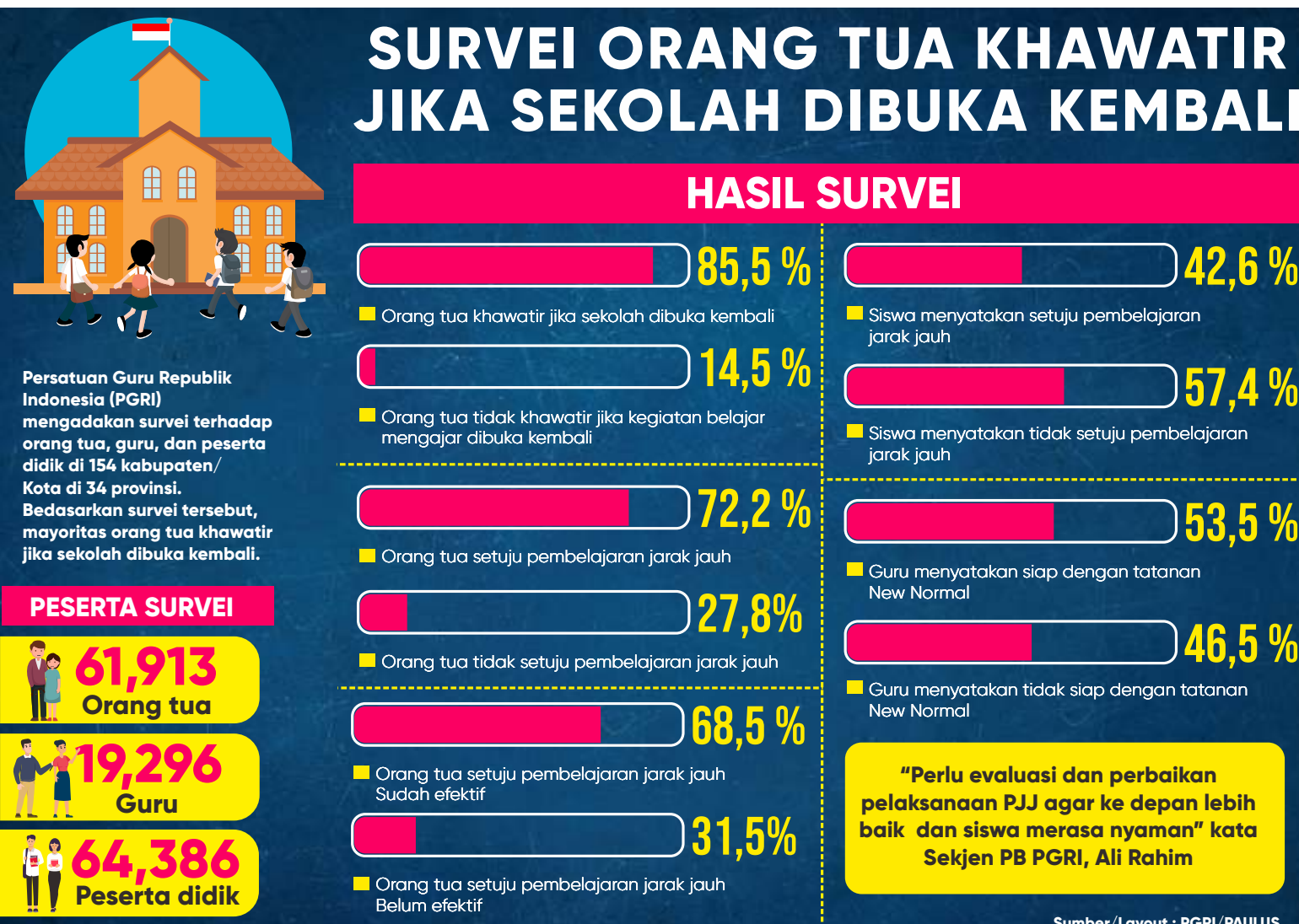
Kantor Kecamatan Bubutan Lockdown

Di sisi lain, sebanyak empat pegawai kecamatan Bubutan Kota Surabaya dinyatakan positif covid-19. Untuk itu kantor kecamatan Bubutan ditutup dua pekan yakni

dari Selasa (18/8) hingga Senin (31/8).

Camat Bubutan, Eko Kurniawan Purmono mengatakan seluruh pegawai Kecamatan Bubutan, Kelurahan Bubutan dan Kelurahan Jepara melaksanakan isolasi mandiri. Untuk itu pelayanan dihentikan untuk sementara waktu. "Sementara ditutup tapi tetap ada pelayanan. Online sama nitip ke petugas kebersihan, pagi nitip, besok pagi baru diambil, jadi nggak ketemu. Nanti tetap dikerjakan pegawai dari rumah," katanya saat dihubungi, Kamis (20/8).

Eko mengatakan, pihaknya masih bisa melakukan untuk semua pelayanan. Kecuali sidang waris, karena tidak bisa dilakukan selama WFH. Selama kantor Kecamatan Bubutan dan dua kelurahan di Bubutan ditutup, pihaknya telah melakukan swab kepada semua karyawannya. Kini tinggal menunggu hasil swab keluar. Jika dinyatakan negatif, maka pegawai bisa kembali bekerja di kantor. "Swab kemarin sekitar 80 orang, baru lima yang hasilnya keluar. Tapi empat yang positif itu hasilnya sudah negatif sudah lama mulai tanggal 6 Agustus," ujarnya. (ard)



TAK ADA CALON INDEPENDEN DI PILWALI BLITAR TAHUN 2020

Blitar - Pemilihan Walikota (Pilwali) Blitar tahun 2020 batal dimeriahkan oleh kehadiran bakal pasangan calon (bapaslon) jalur independen. Kepastian itu didapat setelah dalam tahapan perbaikan syarat dukungan dan verifikasi faktual (verfal), dua (2) Bapaslon tidak memenuhi syarat minimal dukungan. Kedua bapaslon jalur independen tersebut adalah Purnawan Buchori - Indri Kuswati dan Liminingsih - Teteng RC.

Hal tersebut diumumkan sesuai dengan hasil Pleno Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan Bapaslon Perseorangan Pilwali Kota Blitar Tahun 2020 yang digelar KPU Kota Blitar, Kamis (20/8/2020) siang. Disampaikan Ketua KPU Kota Blitar, Choirul Umam jika dalam proses tahapan perbaikan syarat dukungan calon independen dari semula ada 3 bapaslon, hanya 2 yang lolos tahap verifikasi administrasi (vermin) dan dilanjutkan verifikasi faktual (verfal) syarat dukungan. Karena jumlah dukungan perbaikan yang diserahkan, totalnya melebihi syarat minimal dukungan yakni 11.355.

"Yaitu bapaslon menyerahkan Purnawan Buchori - Indri Kuswati sebanyak 9.896 dan Liminingsih - Teteng RC sebanyak 12.186. Dijumlah dengan syarat dukungan awal, yakni 5.883 dan 5.469 jumlahnya melebihi syarat dukungan minimal," ujar Umam.

Selanjutnya, jelas Umam kedua bapaslon

independen tersebut lolos tahapan verfal syarat dukungan perbaikan. Dengan cara dikumpulkan oleh tim bapaslon, kemudian dilakukan verfal oleh petugas dari KPU atau pendukung datang ke sekretariat PPS. "Hasil verfal tadi direkap di tingkat PPK, kemudian ditetapkan dalam pleno hari ini," jelasnya.

Hasil verfal syarat dukungan bapaslon jalur independen, ditetapkan untuk pasangan Purnawan Buchori - Indri Kuswati sebanyak 9.912 dan pasangan Liminingsih - Teteng RC 10.018. Jumlah syarat dukungan keduanya tidak memenuhi syarat dukungan minimal untuk bisa daftar ke KPU, sebagai paslon dari jalur independen dengan syarat minimal dukungan 11.355. "Jadi sesuai keputusan pleno, kesimpulannya tidak ada bapaslon yang lolos dan bisa mendaftar sebagai calon independen ke KPU pada 4-6 September 2020 mendatang," tandas Umam.

Ditanya mengenai adanya keberatan dari bapaslon Liminingsih - Teteng RC terkait penetapan rekapitulasi dukungan, serta akan menempuh jalur hukum. Umam menjawab jika semua keberatan sudah terjawab, dengan dibukanya data. "Kalau memang keberatan, jalurnya melalui Bawaslu bukan ke ranah hukum. Karena menyangkut administrasi," pungkasnya.

Keberatan ini disampaikan Liminingsih sesuai pleno, karena pihaknya merasa dirugikan dengan adanya pandemi



Bapaslon jalur independen Liminingsih - Teteng RC menerima hasil rekapitulasi KPU Kota Blitar

Covid-19 yang menyebabkan beberapa kelurahan di lockdown. Sehingga kesulitan mengumpulkan dukungan, serta waktu yang hanya 7 hari untuk perbaikan syarat dukungan juga terlalu pendek. "InsyaAllah kami akan menindaklanjuti laporan ke Bawaslu dan menempuh jalur hukum," kata Liminingsih.

Sementara itu dalam rapat pleno, yang dihadiri PPK, Bawaslu, serta kedua bapaslon. Sengaja dibatasi terkait penerapan protokol kesehatan, sementara pihak Polres Blitar melakukan pengamanan terhadap adanya pendukung bapaslon Liminingsih - Teteng RC yang datang ke lokasi acara di salah satu rumah makan di Kota Blitar tersebut. Sedangkan bapaslon Purnawan Buchori - Indri Kuswati tampak tidak hadir dalam acara ini, namun sudah dihubungi dan menyatakan menerima hasil rekapitulasi yang ditetapkan KPU. (ais)

KPU JEMBER SOSIALISASIKAN SYARAT PENDAFTARAN

HINGGA KINI BARU 1 BACALON INDEPENDEN YANG PENUHI SYARAT

Jember - Pendaftaran peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Jember makin dekat. Setidaknya awal bulan September sudah dimulai pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati (Cabup-Cawabup) yang direkomendasikan parpol maupun lewat jalur perseorangan.

KPU Kabupaten Jember bersama KPU Jatim pun menggelar sosialisasi yang dihadiri jajaran pengurus partai politik dan utusan jalur independen. Sosialisasi tersebut terkait PKPU nomor 5 tahun 2020 Tentang Tahapan Jadwal dan perubahan PKPU nomor 5 menjadi UU Pemilu nomor 2.

Untuk diketahui, sampai saat ini di Jember baru ada 1 Bacalon yang sudah bisa mendaftar ke KPU yakni melalui jalur perseorangan. Untuk diketahui, Pendaftaran cabup dimulai pada 4 sampai 6 September mendatang.

Sedangkan untuk kandidat yang lain masih belum bisa dikatakan calon, karena harus memenuhi beberapa persyaratan yang sudah ditentukan dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020. "Sampai saat ini, di Jember yang sudah memenuhi persyaratan untuk mendaftar baru 1 pasangan dan pasangan ini sudah bisa disebut sebagai

bakal calon bupati, sedangkan untuk yang lain, masih belum bisa disebut sebagai bacalon, karena harus memenuhi persyaratan yang sudah diatur UU Pemilu," terang Ikhsan Kurniawan Komisioner KPU Jatim, Kamis (20/8).

Ikhsan juga menjelaskan, untuk persyaratan pencalonan melalui partai politik harus memenuhi kuota 20 persen dari jumlah kursi di DPRD Kabupaten. Selain itu, pasangan calon tersebut harus mengantongi rekomendasi dari DPP yang ditanda tangani oleh ketua dan Sekretaris serta diakui oleh Kemenkum HAM.

"Yang bisa dinyatakan sah sebagai partai pengusung, adalah calon mengantongi B-KWK (form dukungan) dan B 1-KWK Parpol yakni tentang keputusan DPP terhadap persetujuan Paslon," ujarnya. Sedangkan untuk partai yang mengalami dualisme kepengurusan, maka yang akan di pakai oleh KPU adalah yang sah sesuai SK Kemenkum HAM.

Ikhsan menambahkan, SK DPP untuk DPD atau DPC Kabupaten yang sah harus diserahkan pada saat melakukan pendaftaran dan tidak bisa dilakukan perubahan lagi. Perubahan diberikan kepada paslon hanya mengenai dokumen pen-



KPU Kabupaten Jember bersama KPU Jatim menggelar sosialisasi PKPU Tentang Tahapan Pilkada 2020

dukung seperti Ijazah, maupun surat kelengkapan lain selain dukungan dari Parpol.

"Misalnya, pada tanggal 4 ada parpol yang mengusung si A, namun pada tanggal 5 tiba-tiba ada perubahan pikiran, dan pindah mengusung si B, maka hal ini tidak bisa dilakukan, dan yang diakui oleh KPU adalah paslon yang didaftarkan pertama dalam hal ini si A," terangnya.

Sedangkan untuk batasan sengketa dualisme kepengurusan Partai, KPU memberikan batasan waktu kepada parpol sampai pada 3 September 2020 untuk memperbarui SK Kepengurusan baik DPD/DPW Propinsi maupun DPD/DPC Kabupaten. (moko)

PERJALANAN HAJI ASAL INDONESIA DARI WAKTU KE WAKTU

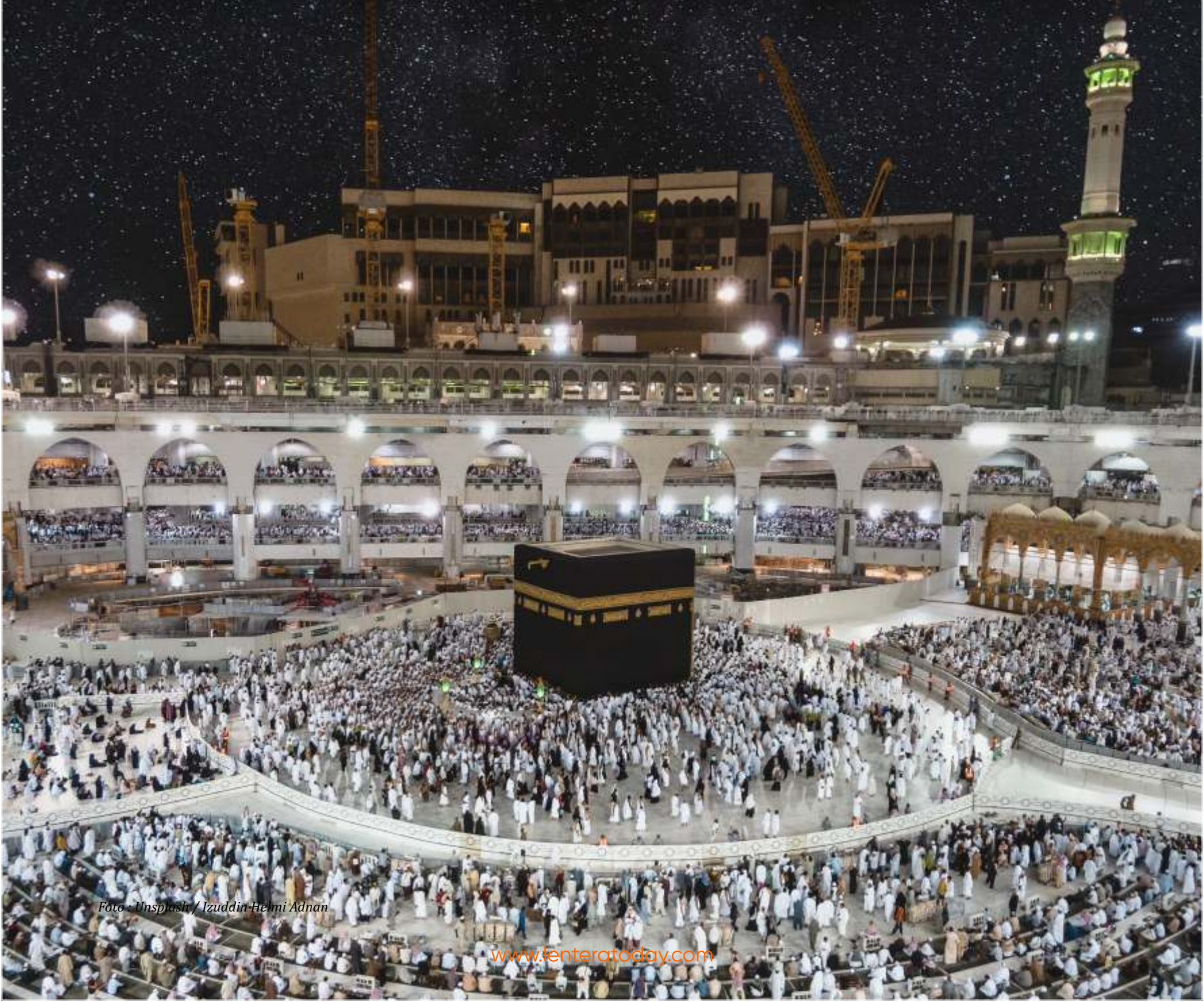


Foto: Unsplash / Izuddin Helmi Adnan

Musim Haji 1441 H/2020 telah berlalu. Pemerintah Saudi membatasi jemaah dari biasanya 2,5 juta orang menjadi hanya 1.000 orang saja.

Padahal sebelumnya, jutaan manusia berbondong-bondong pergi ke Makkah untuk menjalankan rukun Islam yang kelima. Khususnya di Indonesia, setiap tahunnya tak pernah absen terkait keberangkatan mereka ke Tanah Suci tersebut.

Namun tahun ini 1441 Hijriah ibadah haji terpaksa ditunda, akibat Covid-19 yang masih mewabah di sejumlah negara termasuk di Tanah Suci.

Di masa sekarang, jemaah berangkat ke Tanah Suci jauh lebih mudah karena menggunakan pesawat terbang dan hanya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 8-9 jam.

Zaman dulu untuk sampai ke Makkah, jemaah dari nusantara harus menempuh waktu berbulan-bulan. Dikutip dari beberapa sumber, orang Indonesia, telah melakukan perjalanan ibadah haji sejak ratusan tahun lalu lebih.

Orang Indonesia yang tinggal bertahun-tahun atau menetap di Mekah, untuk menuntut ilmu agama, juga pada zaman itu mencapai jumlah yang cukup banyak. Sekurangnya sejak tahun 1860, bahasa Melayu merupakan bahasa kedua di Mekah, setelah bahasa Arab. Padahal saat itu, orang Nusantara untuk berhaji memerlukan waktu yang lama dan

perjalanan laut yang membahayakan.

Bermula pada abad ke-16 ketika kerja sama dengan Arab semakin marak. Ini ditandai dengan adanya para ulama Nusantara ikut pelayaran menjelajahi Asia Barat. Saat 1562 armada dari Aceh mulai berlayar ke Jeddah untuk berdagang.

Sebelum ada kapal api, perjalanan haji harus dilakukan dengan perahu layar, yang sangat tergantung kepada musim. Kemudian para haji juga menumpang pada kapal dagang.

Dengan menggunakan transportasi itu berarti mereka terpaksa sering pindah kapal. Martin menyebutkan perkiraan rute mereka. Perjalanan membawa mereka melalui berbagai pelabuhan di Nusantara ke Aceh, pelabuhan terakhir di Indonesia (oleh karena itu dijuluki Serambi Makkah), mereka menunggu kapal ke India.

Pada saat itu juga Indonesia (kecuali Aceh) mulai dijajah Belanda, dan para calon jemaah haji pun semakin bertambah. Pemerintahan Belanda pun ikut serta dalam memberangkatkan mereka yang akan ke Tanah Suci.

Namun mereka mengurangi jumlah kuota calon jemaah, karena dikhawatirkan akan terjadinya pemberontakan yang muncul antara Belanda dan jemaah.

Pada abad ke 18, pemberangkatan jemaah haji menggunakan kapal laut makin marak. Puluhan ribu jemaah diberangkatkan dengan menggunakan kapal-kapal besar. Waktu yang dibutuhkan agar sampai ke Makkah

adalah lebih dari satu bulan.

Pada saat itu Nederland, Rotterdamsche dan Blue Funnel Line merupakan tiga perusahaan jasa pelayaran yang mengangkut jemaah haji dari Indonesia.

Kemudian setelah Indonesia merdeka, pengurusan keberangkatan haji dialihkan pada pemerintah Indonesia, tepatnya sejak 1948 dan pemerintah pun menyiapkan kapal yang dikhususkan untuk para jemaah yaitu ditangani oleh PT Arafat.

Tapi akhirnya perusahaan tersebut tidak bertahan lama, dan pemerintah menyediakan pesawat terbang pada 1966.

Puncaknya pada 1979, angkutan haji laut harus berhenti seiring dinyatakan pailitnya PT Arafat oleh Kementerian Perhubungan melalui Surat Keputusan Nomor SK-72/OT.001/Phb-79.

Langkah ini ditetapkan karena kala itu PT Arafat sudah tidak dapat bersaing lagi dengan penyedia layanan berhaji menggunakan moda pesawat terbang.

Orang-orang yang menunaikan ibadah haji dari Indonesia memang rata-rata adalah tokoh masyarakat. Setelah pulang berhaji, mereka ditakutkan justru memberikan perubahan di lingkungan sekitar dan akhirnya membahayakan Pemerintah Hindia-Belanda.

Tokoh-tokoh agama yang berhasil pergi ke Tanah Suci saat itu antara lain KH Ahmad Dahlan, Samanhudi, hingga Ki Hajar Dewantara (Ist).



Foto: Unsplash / Adli Wahid



JENIS MASKER TERTENTU BISA TINGKATKAN RISIKO INFEKSI COVID-19

Para ilmuwan telah melakukan tes kepada 14 jenis masker wajah dan menemukan bahwa beberapa di antaranya justru dapat meningkatkan risiko infeksi virus corona Covid-19.

Para peneliti di Duke University di North Carolina mempelajari mulai dari alat pelindung yang digunakan oleh dokter hingga bandana dan masker rajutan.

Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa masker terbaik untuk mencegah virus corona Covid-19 adalah masker N95 yang digunakan oleh para tenaga kesehatan profesional di rumah sakit. Mereka menjadi masker yang menempati posisi paling aman atas dalam penelitian ini.

Para peneliti menemukan bahwa masker tersebut dapat bekerja dengan baik untuk menghentikan penularan virus melalui tetesan pernapasan terutama saat berbicara.

Selain itu masker terbaik kedua yang efektif mencegah penularan Covid-19 adalah masker bedah tiga lapis dan masker yang terbuat dari bahan katun atau kain yang dapat dibuat di rumah.

Mereka dinilai masih bekerja dengan baik dalam menghentikan penyebaran virus corona yang mematikan. Meski demikian ada beberapa masker yang justru memiliki performa buruk yang ditemukan selama penelitian.

Melansir dari The Sun, Selasa (11/8/2020), masker yang kerap dikenakan

pada leher terbukti tidak efektif untuk menghentikan transmisi Covid-19.

Masker ini sering digunakan para pelari dan dinilai lebih banyak menghasilkan tetesan pernapasan karena bahan yang digunakan dapat memecah tetesan besar menjadi partikel yang lebih kecil yang kemudian menyebar lewat udara.

Masker terburuk selanjutnya adalah yang terbuat dari rajutan serta bandana. Kedua jenis masker ini dianggap tidak banyak memberikan perlindungan.

Martin Fischer yang merupakan salah satu penulis penelitian tersebut mengatakan bahwa masker leher sebenarnya meningkatkan risiko infeksi Covid-19.

"Kami sangat terkejut menemukan bahwa jumlah partikel yang diukur dengan masker leher sebenarnya melebihi jumlah partikel yang diukur tanpa mengenakan masker apapun. Kami ingin menekankan bahwa ingin mendorong masyarakat untuk menggunakan masker. Tapi kami ingin mereka menggunakan masker yang benar-benar berfungsi," terang Fischer.

Tes yang dilakukan para peneliti melibatkan kotak hitam yang dilengkapi laser dan kamera ponsel. Pemakai masker kemudian akan berbicara di dalam kotak ke arah laser dan tetesan pernapasan (Droplet) kemudian akan direkam oleh kamera.

Jumlah tetesan pernapasan itu kemudian akan dihitung dengan algoritma komputer. Fischer mengatakan tes tersebut relatif

sederhana dan dapat digunakan oleh perusahaan pembuat masker wajah.

"Ini adalah alat visual yang sangat kuat untuk meningkatkan kesadaran bahwa masker yang sangat sederhana. Seperti masker katun atau kain buatan sendiri ini, sangat efektif untuk menghentikan sebagian besar tetesan pernapasan ini. Perusahaan dan produsen dapat menyiapkan ini dan menguji desain masker mereka sebelum memproduksinya, yang juga akan sangat berguna," tuntasnya (Ist).

MARTIN FISCHER

"Kami sangat terkejut menemukan bahwa jumlah partikel yang diukur dengan masker leher sebenarnya melebihi jumlah partikel yang diukur tanpa mengenakan masker apapun. Kami ingin menekankan bahwa ingin mendorong masyarakat untuk menggunakan masker. Tapi kami ingin mereka menggunakan masker yang benar-benar berfungsi."

Masker bedah tiga lapis (Baik)

N95 (Efektif)

Masker dari bandana (Kurang efektif)

Masker leher (Tidak efektif)



DI TENGAH KERAGUAN ILMUWAN, RUSIA UMUMKAN VAKSIN COVID-19

Rusia mengumumkan temuan vaksin Covid-19 yang diberi nama 'Sputnik V'. Dengan hadirnya vaksin Covid-19 itu, para ilmuwan merasa skeptis dan khawatir dengan apa yang diumumkan oleh Presiden Vladimir Putin.

Melalui laporan BBC, dikabarkan Rusia memulai penelitian vaksin pertama mereka melalui Institut Gamaleya di Moskow pada 17 Juni lalu. Ini menandakan bahwa baru dua bulan pasca penelitian dilakukan, Rusia telah mengklaim bahwa vaksin mereka aman dan efektif untuk menangkal Covid-19.

Selain waktu yang singkat, Institut Gamaleya juga hingga kini belum membeberkan data keamanan dan kekebalan yang dimaksud.

Kekhawatiran juga muncul setelah Kementerian Kesehatan Negara Rusia mengeluarkan sertifikat pendaftaran untuk vaksin 'Sputnik V'.

Dilansir Science Magazine, pada sertifikat itu tertera bahwa vaksin baru diujikan pada 76 orang saja dan baru dapat diguna-

kan pada 1 Januari 2021 setelah uji klinis lanjutan dilakukan.

Dengan ini maka secara tidak langsung Rusia menyatakan bahwa mereka belum melakukan uji coba tahap tiga yang seharusnya dilakukan.

Dalam suatu uji coba setidaknya ada tiga fase yang harus dilalui dan melibatkan subjek maupun jumlah subjek yang berbeda.

Merujuk pada laman web resmi 'Sputnik V', uji coba tahap ketiga baru akan dilakukan pada 12 Agustus dengan melibatkan 2000 orang yang berasal dari Rusia, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Meksiko, dan Brasil.

Ini tentunya menjadi hal yang sangat berisiko. Seharusnya pengumuman keberhasilan dipublikasikan setelah uji coba tersebut selesai. Mengingat dengan jumlah tersebut tidak menutup kemungkinan 'Sputnik V' dapat dinyatakan gagal.

Sebagaimana dilansir New York Times, Natalie Dean, ahli biostatistik dan penyakit menular di University of Florida sebelumnya mencatat bahwa vaksin yang telah

melalui fase pertama dan kedua dengan sukses dapat tetap gagal pada tahap selanjutnya.

Inilah mengapa ilmuwan dunia merasa Rusia tidak sebaiknya gegabah hanya untuk menjadi yang nomor satu.

Hingga kini belum dipastikan apakah Rusia akan tetap menyatakan vaksin 'Sputnik V' sebagai suatu keberhasilan. Namun sejauh ini, di September mendatang, Rusia telah menjadwalkan untuk memproduksi vaksin tersebut dalam jumlah besar.

Ini akan digunakan untuk vaksin massal pada Oktober mendatang sebelum akhirnya 'Sputnik V' dipasarkan secara global (Ist).



Foto : Handout/ Russian direct investment fund/ AFP

ATASI WAJAH BERMINYAK

Wajah berminyak memang seringkali mengganggu penampilan. Tak disangka, ternyata lemon terbukti ampuh mengurangi produksi minyak berlebih di wajah, lho.

MENGOBATI JERAWAT

Jerawat di wajah memang sangat mengganggu kepercayaan diri. Namun jangan khawatir, selain soda kue, lemon juga bermanfaat untuk mengobati jerawat di wajah. Hal ini dikarenakan lemon mengandung bahan yang bersifat anti-bakteri sehingga bisa menyingkirkan bakteri-bakteri penyebab jerawat.

MEMUTIHKAN WAJAH

Tidak sedikit perempuan yang menginginkan kulit wajahnya putih dan berseri. Eits... jangan tergesa-gesa untuk menggunakan produk pemutih wajah yang sangat mahal. Kamu bisa menjadikan lemon sebagai bahan pemutih wajah alami. Manfaat lemon untuk wajah yang satu ini tentunya sangat diinginkan oleh banyak perempuan. Kandungan vitamin C dan asam sitrat di dalam lemon bisa membantu mencerahkan kulit wajah sehingga nampak lebih putih.

Tetap Tampil Segar Kala Usia 42.

✕ Ini Trik Aktris Ha Ji Won ✕

Sudah 25 tahun sejak Ha Ji Won debut di industri hiburan Korea Selatan. Saat berusia 37 tahun dia pernah terpilih sebagai selebriti dengan kulit terbaik. Ia sempat berbagi bahwa dia memakai masker wajah setiap hari untuk menjaga kulitnya agar tetap cantik. Baru-baru ini, Ha Ji Won kembali mencuri perhatian lewat kecantikannya yang tidak berubah. Ia pun membagikan metode rahasianya agar tampak awet muda dan memiliki kulit bersih terawat dalam sebuah wawancara.

Aktris kelahiran Seoul, 28 Juni 1978 ini mengungkapkan bahwa dia makan sekitar 3 lemon sehari untuk membantu merawat kulitnya. Dia percaya kebiasaan ini juga membantunya mempertahankan penampilan awet muda karena membuat kulitnya lebih kencang. Untuk mengetahui lebih jelas lagi terkait manfaat lemon untuk kecantikan, berikut rangkumannya

MENGECILKAN PORI-PORI WAJAH

Tak disangka, lemon ternyata juga bisa mengecilkan pori-pori wajah dan menutupnya. Hal ini dikarenakan buah lemon bersifat sebagai astringen kulit yang bisa merangsang pori-pori kulit kembali tertutup sehingga kulit menjadi lebih kencang.

MENGGANGKAT SEL-SEL KULIT MATI

Manfaat lemon untuk wajah dapat juga mengangkat sel-sel kulit mati yang menempel di wajah. Hal ini dikarenakan lemon mengandung antiseptik. Antiseptik bersifat mengelupas sel-sel kulit yang telah mati.

ATASI PENUAAN DINI

Tanda-tanda penuaan dini berupa keriput, age spot, dan pigmentasi bisa kamu atasi dengan menggunakan lemon. Kandungan vitamin C yang tinggi pada lemon bersifat antioksidan. Antioksidan pada lemon tersebutlah yang akan membantu sel-sel kulit wajah untuk menangkal radikal bebas. Selain itu, antioksidan pada lemon juga akan merangsang peningkatan produksi kolagen kulit sehingga tanda penuaan bisa diatasi segera.



HA JI WON
AKTRIS

RI 'Bakar' (dari hal 1)

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengeluarkan kajian terbaru terkait pengelontoran dana secara besar-besaran oleh Pemerintah untuk ragam aktivitas digital, salah satunya media sosial dan influencer, guna sosialisasi kebijakan selama beberapa tahun terakhir. Kajian berjudul 'Aktivitas Digital Pemerintah: Berapa Milyar Anggaran Influencer?' dilaporkan oleh peneliti ICW, Egi Primayogha, Kamis (20/8).

Egi mengatakan lembaganya telah melakukan penelusuran aktivitas pengadaan barang dan jasa (PBJ) di kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) di masing-masing situs LPSE. Kata dia, ada total 34 kementerian, lima LPNK, dan dua institusi penegak hukum--Kejaksaan Agung RI dan Kepolisian RI--yang ditelusuri oleh lembaganya.

"Pengumpulan data 14-18 Agustus lalu. Beberapa kata kuncinya seperti: media sosial/social media, influencer, key opinion leader, komunikasi, Youtube," kata Egi dalam paparannya.

Kata Egi, lembaganya menemukan bahwa total anggaran belanja pemerintah pusat terkait aktivitas yang melibatkan influencer sepanjang tahun 2014 hingga 2020 adalah sebesar Rp90,45 miliar "Penggunaan influencer semakin marak sejak 2017," kata Egi.

Egi memaparkan temuan lembaganya jika anggaran belanja pemerintah untuk aktivitas yang melibatkan influencer sebesar itu dibagi berdasarkan instansi. Anggaran terbanyak dipegang oleh Kementerian Pariwisata sebesar Rp77,66 miliar (22 paket) diikuti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp1,6 miliar (12 paket).

Dalam lampiran yang dipaparkan Egi, tertulis bahwa Kemendikbud mengelontorkan dana sebesar Rp114,4 juta untuk Gritte Agatha dan Ayushita WN, serta Rp114,4 juta untuk Ahmad Jalaluddin Rumi dan Ali Syakieb. Gritte Agatha diketahui adalah salah satu influencer yang ikut meramaikan tagar #IndonesiaButuhKerja, yang belakangan ramai dibahas karena menjadi salah satu bahan kampanye RUU Cipta Kerja dan Omnibus Law.

Contoh lain yang dipaparkan oleh Egi adalah Kementerian Pariwisata yang mengelontorkan dana sebesar Rp5 miliar untuk publikasi branding pariwisata melalui internasional online influencer trip paket IV. "Tak jelas siapa

saja influencer-nya. Itu berada di bawah Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II," kata Egi. Dengan adanya temuan-temuan terkait pengeluaran anggaran jumbo untuk jasa influencer, kata Egi, lembaganya menilai bahwa Presiden Joko Widodo tak percaya diri dengan program-programnya sendiri sehingga harus menggunakan jasa influencer.

"Apabila ditelusuri lagi ke sumber-sumber lain dan pemerintah daerah, tak menutup kemungkinan anggaran lebih besar dari itu," kata Egi. Egi juga mempertanyakan bagaimana akuntabilitas dan transparansi Pemerintah ketika menggunakan jasa influencer. "Bagaimana Pemerintah menentukan bahwa suatu isu yang butuh bantuan influencer? Bagaimana Pemerintah menentukan individu yang layak jadi influencer? Ini belum jelas," kata Egi.

Dengan seperti itu, Egi juga mempertanyakan apakah institusi kehumasan di setiap lembaga negara sudah berjalan baik dan optimal sehingga harus memakai influencer untuk sosialisasi kebijakan. Penggunaan jasa influencer untuk sosialisasi kebijakan, kata Egi, rentan membawa Pemerintah untuk memiliki kebiasaan mengambil jalan pintas. "Guna memuluskan sebuah kebijakan publik yang tengah disusun, Pemerintah gunakan jasa influencer untuk pengaruhi opini publik. Ini tidak sehat dalam demokrasi karena mengaburkan substansi kebijakan yang tengah disusun dan tertutupnya percakapan dengan publik," katanya.

Terpisah, Dosen komunikasi politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan, "Yang terjadi adalah realitas semu, karena dukungan yang diciptakan adalah dukungan yang dimobilisir dan memanipulasi kesadaran publik."

Menurut Adi, yang akan muncul dari kampanye oleh para influencer maupun pendengung (buzzer) justru persepsi politik yang cenderung dipaksakan karena tak sesuai kenyataan. Padahal, ujar dia, banyak publik yang justru menolak RUU Cipta Kerja. "Publik enggak mendukung, jangan dipaksa dan dikesankan mendukung. Dan jangan menghamburkan duit negara untuk sesuatu yang tidak terlampau penting," ucap Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu.

Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing mengatakan penggunaan jasa influencer bisa menghilangkan daya

berpikir kritis masyarakat. "Mereka kan opinion leader bagi para followers-nya. Jadi kecenderungan [narasinya] diterima, ya iya. Apalagi kalau followers-nya yang sudah fanatik. Jadi tidak kritis lagi. Apa kata influencer diikuti," ungkapnya.

Untuk itu, menurutnya seorang influencer memiliki tanggung jawab memberikan ruang berpikir kritis bagi pengikutnya. Hal ini pun patut dipertimbangkan pihak yang menyewa jasa influencer.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menduga munculnya promosi RUU Ciptaker oleh influencer merupakan upaya pemerintah meminimalisir kisruh dan perdebatan. Ia menilai pemerintah ingin menghindari insiden yang terjadi saat pembahasan RUU Komisi Perlindungan Korupsi dan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada akhir 2019.

"Saya rasa ini memang upaya pemerintah untuk meredam itu. Saya apresiasi sih pemerintah berupaya gimana masyarakat memahami tentang ini. Karena ini kan baru, omnibus law," ujarnya.

Namun begitu, ia setuju pemakaian influencer dalam mempromosikan RUU harus disertai pemahaman yang lengkap. Influencer yang digandeng harus yang memiliki pemahaman dengan ragam latar belakang yang dapat mencerdaskan masyarakat. (ist,ins)

KEGIATAN

MELIBATKAN INFLUENCER

Total Anggaran Periode 2014-2020
sebesar **Rp90,45 miliar**

Menurut Lembaga/Kementerian

- **Kementerian Pariwisata :** Rp77,66 miliar (22 paket)
- **Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan :** Rp1,6 miliar (12 paket)
- **Kemenkominfo :** Rp10,83 miliar (4 paket)
- **Kementerian Perhubungan :** Rp195,8 juta (1 paket)
- **Kementerian Pemuda dan Olahraga :** Rp150 juta (1 paket)

KORSEL DALAM BAHAYA, PERSENTASE KEMATIAN DI RI TERTINGGI

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengakui angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia masih lebih tinggi di atas rata-rata dunia. Pada Kamis (10/8) Angka kematian akibat corona di Indonesia sebesar 4,35 persen atau sebanyak 6.418 kasus. Sedangkan rata-rata dunia hanya

sebesar 3,50 persen.

Sementara, sirine bahaya juga dibunyikan Korea Selatan karena mencatat lonjakan tajam kasus baru. Padahal Korsel selama ini tercatat sebagai negara yang berhasil mengendalikan corona. Pada Rabu (19/08), Negeri

Gingseng mencatat 297 kasus baru yang merupakan jumlah harian terbanyak sejak Maret lalu. Semua tempat-tempat usaha yang masuk kategori risiko tinggi seperti museum, klub malam, tempat karaoke dan restoran prasmanan diharuskan tutup di Seoul, Incheon dan Provinsi Gyeonggi.



Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea, Jeong Eun-kyeong

"Kita menghadapi krisis di mana jika penyebaran yang sedang terjadi ini tidak dikendalikan, itu akan menyebabkan ledakan kasus, yang pada akhirnya dapat melumpuhkan sistem kesehatan dan menghancurkan perekonomian kita. Pertama, wabah terjadi di kawasan sekitar Seoul yang sangat padat, dan kedua kluster ini lagi-lagi melibatkan gereja yang sangat tertutup dan ratusan jemaatnya memberikan nomer kontak palsu dalam acara-acara perkumpulan."



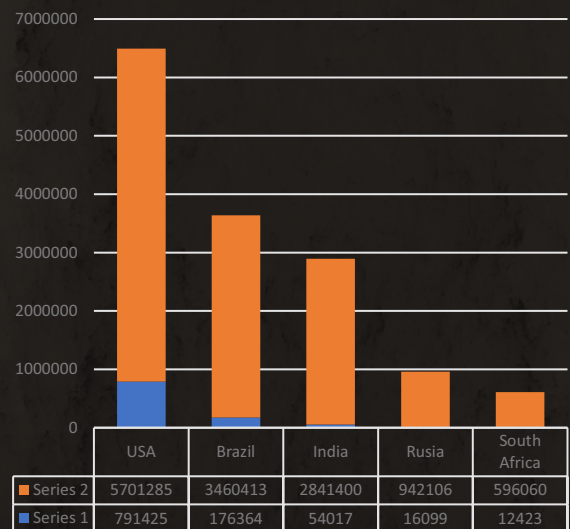
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 RI, Wiku Adisasmito

"Persentase kematian kita adalah 4,44% pada tanggal ini dan dunia adalah 3,5%. Tapi kalau kita lihat standar di dunia, rata-rata kasus aktif 28,7%. Berarti Indonesia kasus aktifnya lebih rendah dari dunia. Sedangkan kasus sembuh di dunia 67,76%, di Indonesia 68,3%. Jadi kita sudah melampaui kesembuhan rata-rata. Sedangkan kasus meninggal di dunia 3,5%, Indonesia masih 4,35% di atas dari rata-rata dunia."

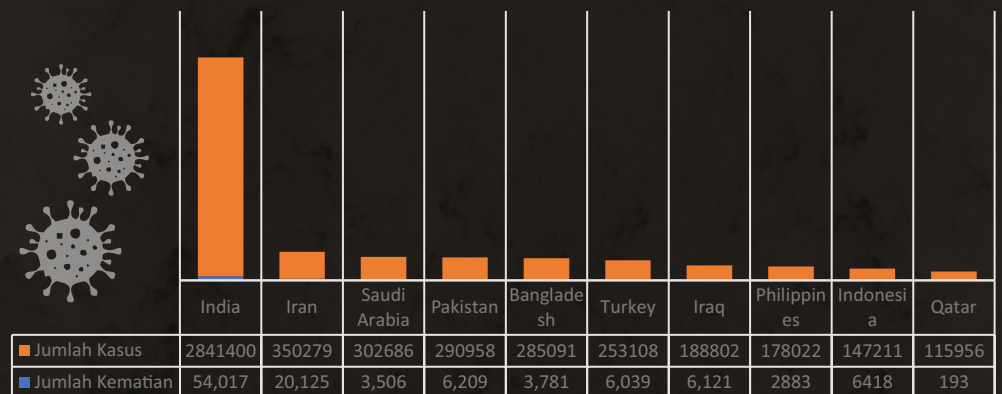
21 PROVINSI DENGAN PERSENTASE KEMATIAN COVID-19 RATA-RATA DUNIA

- | | | |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Maluku: 3,38% | 2,74% | 15. Bali: 1,21% |
| 2. DKI Jakarta: 3,33% | 8. Aceh: 2,62% | 16. Papua Barat: 1,1% |
| 3. Sumatera Barat: 3,11% | 9. Gorontalo: 2,58% | 17. Papua: 1,08% |
| 4. Sulawesi Selatan: 3,1% | 10. Sulawesi Barat: 2,19% | 18. Bangka Belitung: 0,93% |
| 5. Sulawesi Tengah: 3,07% | 11. Maluku: 1,96% | 19. Kalimantan Barat: 0,88% |
| 6. Jawa Barat: 2,79% | 12. Jambi: 1,63% | 20. Kalimantan Utara: 0,61% |
| 7. DI Yogyakarta: 1,48% | 13. Riau: 1,54% | 21. NTT: 0,61% |
| | 14. Sulawesi Tenggara: 1,48% | |

10 NEGARA DENGAN JUMLAH KASUS COVID-19 TERTINGGI DI DUNIA



10 NEGARA DENGAN JUMLAH KASUS COVID-19 TERTINGGI DI ASIA



LMEDIA GROUP

info beriklan

Arso Yudianto ☎ 0852-3664-5322
Joko Prasetyo ☎ 0856-4976-0557

(031) 8785-4491
www.lentera.tv
www.lenteratoday.com
@lenteratoday
Jl. Rungkut Asri Utara VI No 26 Surabaya

#bacadiLenteraToday #KerendiRumah #MediaLawanCovid19